
**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS) DI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA SUKABUMI****Oleh****Nanda Sonia Priyadevi¹⁾, Tuah Nur²⁾, Dian Purwanti³⁾****^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia****E-mail: ¹nandasoniapriyadevi@gmail.com****Abstrak**

Penelitian ini berjudul Implementasi Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Kota Sukabumi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Program BSRS di Kota Sukabumi. Penelitian ini dilatarbelakangi karena Program BSRS belum mencapai target sasaran dan masyarakat yang menerima bantuan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lain. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan informan penelitian yaitu Dinas PUTR Kota Sukabumi. Teknik mengumpulkan data yang dipakai yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari 3 tahapan yaitu reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Validasi data yang dipakai triangulasi sumber, teknik, dan memberchecking. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi Program BSRS di Kota Sukabumi sudah dapat dikatakan efektif dan efisien dilihat dari para pelaksana sudah mengetahui kebijakan, sikap yang diberikan pada saat proses pembangunan dan masyarakat yang mendukung dalam Program BSRS. Namun perlunya peningkatan tenaga fasilitator dilapangan karena masih kurang, lalu menunjukkan dukungan terhadap Program BSRS di Kota Sukabumi secara nyata melalui peningkatan kualitas kinerja dan meningkatkan komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Program BSRS di Kota Sukabumi dengan mengadakan sosialisasi.

Kata Kunci : Implementasi, Program BSRS.**PENDAHULUAN**

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) adalah pembangunan rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran dan perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Program tersebut yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam membangun rumah yang layak huni untuk mensejahterakan masyarakat. Program BSRS merupakan salah satu program dari pemerintah yang dalam upaya untuk memberikan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan tingkat kesejahteraan dan keswadayaan masyarakat. Pelaksanaan Program BSRS harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan dan

sebagai hasilnya mampu menjawab permasalahan kebutuhan perumahan yang layak huni. Program ini akan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan bahan bangunan untuk membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat kesehatan menjadi rumah yang layak huni. Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya mengurangi angka kekumuhan di Kota Sukabumi, melalui Program BSRS Wali Kota Sukabumi berharap bisa mengubah wajah kota yang awalnya kumuh menjadi tidak kumuh. Agar rumah-rumah yang tidak layak huni bisa berkurang dan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak Sebanyak 670 unit rumah tidak layak huni di Kota Sukabumi, Jawa Barat, ditargetkan rampung dibangun pada akhir tahun 2021. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menuntaskan permasalahan rutilahu. Walikota

Sukabumi memberikan pernyataan bahwa ada sebanyak 670 unit rumah yang diperbaiki. Dimana progres perbaikan ini melebihi dari target yang ditetapkan berharap karena sudah melebihi target maka wilayah lainnya dapat disentuh dan akan ditambah. Program BSRS dari Dinas PUTR Kota Sukabumi sebesar 20 juta dengan dana stimulan ini ada swadaya dari warga supaya selesai dengan baik. (Republika.co.id, 2021).



Gambar 1.1 Kawasan Permukiman Kumuh
 (Sumber: Republika.co.id, 2021)

Tabel 1.1 Rumah tidak Layak Huni di Kota Sukabumi

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Baros	188
2.	Cibeureum	116
3.	Cikole	185
4.	Citamiang	312
5.	Lembursitu	85
6.	Warudoyong	41
7.	Gunungpuyuh	80

(Sumber : Dinas PUTR Kota Sukabumi, 2021)

Berdasarkan data tersebut terlihat tiga kecamatan yang memiliki jumlah Rumah Tidak Layak Huni terbanyak yaitu Kecamatan Citamiang, Baros dan Cikole. Program BSRS ini dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang "Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021". Program BSRS ini merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam membangun

atau peningkatan kualitas rumah, prasarana dan sarana. Tujuan dari program ini yaitu terbangunnya rumah yang layak dihuni oleh masyarakat yang didukung dengan akan tersedianya prasarana dan sarana sehingga membuat permukiman serta perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan. Program BSRS diperlukan implementasi program. Implementasi program pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Mulyadi (2015:45), "Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan". Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dengan mengadakan sarana serta prasarana untuk mendukung program yang dijalankan.

LANDASAN TEORI

Definisi Kebijakan Publik

Menurut Wibowo (2011:3) mengemukakan pendapat bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik dari tingkat pusat maupun tingkat terendah atau badan/Lembaga/organ supra-negara. Nugroho (2006:23) secara sederhana mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah. Rumusan tentang kebijakan publik ini dikutip dari pendapat Dye (1995). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian tersebut memiliki penjabaran yang luas. Kata "setiap sesuatu" mencerminkan bahwa kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam berbagai lini kehidupan sehari-hari, baik hubungan antarwarga negara maupun warga negara dengan pemerintah. Sedangkan kata "dikerjakan atau tidak dikerjakan" yang kata asalnya adalah kerja sudah merangkum proses pra kerja dan pascakerja.

Definisi Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (*mengimplementasikan*) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Meter dan Van dalam (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dari penelitian dan lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2019:18). Informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dimana teknik menentukan sampel sengaja dipilih agar mendapatkan data dan informasi yang akurat berhubungan dengan judul yang

akan diteliti yaitu Dinas PUTR Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan *memberchecking*. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan sumber data yang sama. Teknik yang dimaksud peneliti yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (Sugiyono, 2018:243). *Memberchecking* adalah pengecekan data yang telah diperoleh peneliti kepada pemberi data dengan cara peneliti akan membawa kembali laporan kepada informan untuk memastikan data yang didapatkan sudah benar. *Memberchecking* juga dapat mengklarifikasi bias yang terjadi pada saat proses mengumpulkan data. Sedangkan tahap analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Kota Sukabumi Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan publik menurut Jenkins dalam Wahab (2017:15) sebagai suatu serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Pada dasarnya sebuah kebijakan dirancang untuk mencapai sebuah tujuan yang telah

ditentukan. program penerapan BSRS memiliki tujuan untuk mengurangi masyarakat yang miskin, kemudian untuk memulihkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat tinggal di rumah yang layak. Tinggal di rumah yang layak tentunya membantu masyarakat terhindar dari segala penyakit. Selain itu juga melalui program BSRS merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah dan berharap meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman. Dalam merealisasikan program BSRS tentunya merupakan metode untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat kota sukabumi melalui pendayaan sumber-sumber yang tersedia serta menekankan partisipasi sosial. Hasil wawancara tersebut sesuai dengan penerapannya yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun sekali sebagai program pembangunan infrastruktur yang sifatnya menunjang bagi kegiatan masyarakat miskin dan sampai selesainya pembangunan rumah yang layak huni. Selanjutnya program BSRS melibatkan antara aparaturnya penyelenggara dan masyarakat untuk melakukan koordinasi dengan mendorong tumbuh kembangnya perilaku dan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap kepercayaan yang telah diterimanya guna mencegah munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan dana maupun kegiatan serta mengupayakan agar dapat secara cepat dilakukan tindakan pembnaganan rumah yang layak huni dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Sumber Daya Kebijakan

Pelaksanaan sebuah kebijakan atau program pemerintah perlu adanya dukungan dari sumber daya yang memadai. Pandangan Meter dan Horn dalam buku Agustino (2013:150) mendefinisikan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya

disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan yaitu terdapatnya para pelaksana yang melakukan survei ke lokasi atau lapangan dalam melakukan pembangunan Program BSRS dan terdapat kekurangan tenaga kerja. permasalahan kekurangan tenaga kerja harus menemukan solusi seperti merekrut tenaga kerja yang cukup dikarenakan keberhasilan proses implementasi Program BSRS sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia, karena jumlah para pelaksana memberikan efek yang positif bagi keberhasilan implementasi Program BSRS. Jika tenaga kerja/para pelaksana kurang maka akan mempengaruhi kurangnya kecakapan, kompetensi maupun kapabilitas yang dimiliki oleh para pelaksana Program BSRS.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat cocok dengan para agen pelaksananya. Salah satu yang dapat dijadikan tujuan dari adanya kebijakan yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. bahwa pemenuhan kebutuhan rumah layak huni oleh para pelaksana atau pegawai sudah dicukupkan dan terus mengupayakan agar Program BSRS ini berjalan dengan lancar. Salah satunya yaitu melalui mencukupinya kebutuhan bahan bangunan dengan melakukan koordinasi dan melakukan pemesanan untuk memudahkan masyarakat serta para pelaksana pada saat proses pembangunan. Kondisi pada saat di lapangan, para pelaksana sudah melaksanakan sesuai aturan tersebut dan berkoordinasi dengan

Seksi Perencanaan Pembangunan. Pihak Implementor BSRS mengambil keputusan yang sesuai dengan SOP dan kondisi organisasi pelaksana. Adapun untuk teknis pengawasan

direalisasikan secara langsung dan menilai bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi Program BSRS ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Apabila Program BSRS telah dilaksanakan sesuai dengan rencana maka implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran Program BSRS.

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan harus memiliki sikap yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan ketika melaksanakannya, hal ini agar dapat meminimalisir berbagai masalah yang kemungkinan akan menjadi penghambat dalam tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan. sikap para pelaksana sudah mendukung sepenuhnya terhadap adanya Program BSRS yang dilaksanakan di Kota Sukabumi karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Program BSRS sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak dihuni selain itu juga pihak pelaksana Program BSRS melakukan kerjasama dan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menjalankan program ini agar tepat sasaran kepada masyarakat. Untuk melaksanakan Program BSRS kepada masyarakat dari pihak pelaksana membentuk sebuah organisasi yang memiliki budaya tersendiri dimana harus berpartisipasi secara aktif dan menjalin komunikasi dengan baik sehingga masyarakat memiliki pandangan yang baik terhadap sikap pelaksana seperti pembangunan yang bermutu dan juga mutu

kinerja organisasi maupun mutu kinerja individu akan lebih mudah menerima dan menjalankan Program BSRS ini. Sikap pelaksana terhadap Program BSRS memang sudah sangat baik kemudian juga dari segi pengetahuan para pelaksana menyatakan pemahaman mereka yang semakin baik terhadap apa yang dimaksudkan sebagai organisasi yang bermutu dalam melaksanakan pembangunan Program BSRS, memastikan bahwa Dinas PUTR Kota Sukabumi memiliki sasaran mutu, dimana penerapan dan sertifikasi yang diterima oleh pihak dinas telah mendorong semangat mereka untuk bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivistik Pelaksana

Komunikasi merupakan salah satu dimensi yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada pelaksana kebijakan yang sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Melalui penyaluran komunikasi dan koordinasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik. Dalam penyaluran komunikasi sering sekali terjadinya salah pengertian (*miss communication*) yang menghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi antar organisasi umumnya dapat berupa koordinasi, ini merupakan hal yang perlu dilakukan agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Adapun Instansi yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan Program BSRS mencakup Kementerian PUPR, BPKAD Kota Sukabumi, BAPPEDA Kota Sukabumi, Dinas PUTR Kota Sukabumi, Bank Jabar, toko material, tenaga fasilitator lapangan, dan penerima bantuan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Metter dan Van Horn apa yang menjadi standar tujuan program harus dipahami oleh para pelaksana yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan melalui koordinasi yang baik. koordinasi yang dilakukan para pelaksana dengan instansi

lainnya sudah dijalankan dengan baik seperti pemberian data dari calon penerima bantuan Program BSRS lalu akan dilakukan verifikasi data untuk memperoleh hasil apakah calon penerima tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan bantuan Program BSRS. Koordinasi yang dilakukan para pelaksana kepada masyarakat yang dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang Program BSRS di Kota Sukabumi dilakukan melalui bentuk sosialisasi atau pemberian pemahaman seputar informasi yang menyangkut Program BSRS.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga dipertahankan untuk menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditentukan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penghambat dari kegagalan implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kenyamanan kondisi lingkungan eksternal. Untuk lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi Program BSRS yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi tidak mengalami kendala, hal ini dapat dibuktikan dari segi biaya yang telah diberikan dari pemerintah pusat, politik yang telah mendukung dalam melaksanakan Program BSRS dan sosial masyarakat yang memberikan feedback yang positif terhadap Program BSRS yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Program BSRS tentunya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan aspek. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik tentu berpengaruh. Sejauh ini lingkungan ekonomi, sosial dan politik berdampak positif terhadap pelaksanaan Program BSRS kemudian juga didukung dengan adanya kucuran dana dari pemerintah pusat, lalu dari lingkungan sosial yang sangat berpengaruh karena dengan dilakukannya

Program BSRS akan meningkatkan kualitas lingkungan yang tentu mendapatkan dukungan dan dorongan penuh dari masyarakat. Selanjutnya dari lingkungan politik yaitu dengan adanya aturan dalam mengimplementasikan Program BSRS ini sebagai bukti dukungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dimulai dari mengumpulkan data sampai dengan pembahasan penelitian mengenai Program BSRS di Kota Sukabumi maka implementasi Program BSRS yang dilaksanakan sudah dapat dikatakan efektif dan efisien dilihat dari 6 dimensi implementasi dari van metter dan van horn dapat disimpulkan bahwa : Dimensi ukuran dan tujuan kebijakan yaitu dalam mengimplementasikan Program BSRS di Kota Sukabumi, para pelaksana sudah mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan Program BSRS dan memahami apa yang menjadi ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut. Dimensi sumber daya kebijakan yaitu pada pelaksanaan Program BSRS yang telah dilaksanakan untuk para pelaksana atau tenaga fasilitator dilapangan masih minim dan kurang pada saat dilapangan sehingga perlunya perekrutan tenaga fasilitator. Dimensi karakteristik agen pelaksana yaitu untuk dapat memenuhi kepentingan para pekerja lapangan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni oleh para pelaksana atau pegawai sudah dicukupkan dan terus mengupayakan agar Program BSRS ini berjalan dengan lancar. Dimensi sikap/kecenderungan para pelaksana yaitu sikap para pelaksana sudah mendukung sepenuhnya terhadap adanya Program BSRS yang dilaksanakan. Dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana yaitu Instansi yang terlibat dalam proses komunikasi dan implementasi Program BSRS mencakup Kementerian PUPR, BPKAD Kota Sukabumi, BAPPEDA Kota Sukabumi, Dinas PUTR Kota

Sukabumi, Bank Jabar, toko material, tenaga fasilitator lapangan, dan penerima bantuan agar Program BSRS ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu Untuk lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi Program BSRS yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi tidak mengalami kendala, hal ini dapat dibuktikan dari segi biaya yang telah diberikan dari pemerintah pusat, politik yang telah mendukung dalam melaksanakan Program BSRS dan sosial masyarakat yang memberikan feedback yang positif terhadap Program BSRS yang dilaksanakan.

Saran

1. Adanya sosialisasi yang merata ke seluruh wilayah Kota Sukabumi oleh pelaksana kebijakan terhadap sasaran kebijakan mengenai Program BSRS agar dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat mencapai target kerja yang telah ditentukan.
2. Adanya penambahan sumber daya manusia yang dapat dilakukan melalui perekrutan tenaga fasilitator dilapangan atau melakukan kolaborasi dengan para pelaksana lainnya sehingga pada saat dilapangan tidak kekurangan para pelaksana kebijakan.
3. Menunjukkan dukungan terhadap Program BSRS di Kota Sukabumi secara nyata melalui peningkatan kualitas kinerja.
4. Meningkatkan komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Program BSRS di Kota Sukabumi dengan mengadakan sosialisasi pada sasaran kebijakan dan melakukan koordinasi bukan hanya pada saat ada hambatan atau pelanggaran tetapi juga melakukannya secara rutin.

- [2] Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik Dan Kelayakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- [3] Nugroho, Rian. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Elex Media Comput Indo.
- [4] Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [5] Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak (Pustaka Pelajar Group).
- [6] Wahab, Abdul Solihin. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN